

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN
ADMINISTRASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
(STUDI PADA OPD PROVINSI RIAU)**

Farhan Bayu Putra¹⁾, Kennedy²⁾, Arumega Zarefar²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : farhanbayup@gmail.com

*The Effect Of Budget Planning, Administrative Records, And Competency Of
Human Resources To The Budget Absorption
(Studies On Organization Of Regional Device In Government Of Riau Province)*

ABSTRACT

The financial realization number and physical of the Riau Regional Budget are still low because the absorption capacity has only reached 68.2% and physically 75% of the target that should have been achieved at least 90%. Several different variables have been tested by several previous researchers associated with budget absorption. The purpose of this study was to test the correlation of 3 (three) independent variables, namely variable x (budget planning, administrative records and human resource competence) with 1 (one) dependent variable, namely variable y (budget absorption) in OPD Riau Province using 3 (three) hypotheses. The method used in this study is a survey method with the respondent is the head of the department / agency, treasurer of expenditure and head of department in OPD Riau Province. The survey was conducted for 52 (fiftytwo) days with a participation rate of 82.72%. The data were processed and analyzed using SPSS version 25. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that budget planning, administrative records, and human resource competence affect budget absorption.

Keywords: *Budget Planning, Administrative Records, Competency Of Human Resources, Budget Absorption.*

PENDAHULUAN

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Namun terjadinya *opportunity cost* akibat munculnya beberapa persoalan yang berkaitan dengan keterlambatan dan adanya unsur

ketidakpastian terhadap serapan anggaran atas uang pemerintah mengakibatkan kurang maksimalnya daya upaya terhadap penempatan dan investasi kas pemerintah daerah.

Apabila keterlambatan ini berelasi dengan aktivitas pembangunan fisik dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, maka akibatnya akan berdampak pada keterlambatan akan penggunaan fasilitas tersebut oleh seluruh lapisan masyarakat. Efek selanjutnya adalah kualitas dari barang dan jasa menjadi

turun akibat waktu dalam penyediaannya sangat terbatas, dan hal ini menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengertian penyerapan anggaran yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Ekonomi Uganda adalah “Kemampuan unit pengeluaran (satuan kerja) pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat waktu.” (*Ministry of Finance, Planning, and Economic Development Uganda*, 2011).

Siti Astiyah, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau menyatakan bahwa “Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi APBD Riau pada triwulan III tahun 2018 relatif rendah jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat pada realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau pada triwulan ke III tahun 2018 sebesar Rp4,69 triliun atau 45,43 persen dari pagu anggaran.”

Keadaan diatas membuktikan masih kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu Provinsi Riau harus berbenah dalam hal efisiensi agar capaian target serapan anggaran dapat terealisasi dengan baik.

Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) melaporkan bahwa proses perencanaan

anggaran sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya tingkat serapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik. Perencanaan yang buruk adalah hambatan yang signifikan mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan faktor yang paling menentukan terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang baik akan berdampak terhadap penyerapan anggaran yang maksimal. Sebaliknya perencanaan anggaran yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya penyerapan anggaran.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, karena semua kegiatan perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berdampak terhadap besarnya kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya (Nugroho, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan terhadap tingkat penyerapan anggaran telah dilakukan sebelumnya oleh Gagola (2017) yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Tisa (2016) yang menunjukkan bahwa perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah pencatatan administrasi. Menurut (Herriyanto, 2012) Persoalan terkait administrasi yang seringkali terjadi di pemerintahan antara lain kesalahan penentuan akun, masa penelaahan anggaran yang terlalu pendek, adanya tambahan pagu karena anggaran belanja tambahan (ABT), tambahan/luncuran pinjaman hibah dalam dan luar negeri (PHLN/PHDN), penerimaan hibah, berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah, verifikasi yang terlalu

lama dari Bendahara umum daerah (BUD). Semua masalah tersebut ikut mempengaruhi realisasi kegiatan pemerintahan.

Salah dalam penentuan akun mengakibatkan dokumen anggaran direvisi dan terjadinya penolakan pembayaran oleh Kantor pelayanan pembendaharaan negara (KPPN). Kesalahan akun sepanjang masih dalam kewenangan pengguna anggaran cukup mengubah arsip data komputer (ADK) dan petunjuk operasional kegiatan (POK). Namun seandainya kesalahan akun tersebut selaras dengan ketentuan harus direvisi melalui Kementerian Keuangan, maka akan memakan proses yang cukup lama. Oleh sebab itu dalam membuat perencanaan anggaran harus memerlukan tingkat kehati-hatian dan ketelitian sehingga penentuan akun tidak menyebabkan revisi anggaran.

Penelitian mengenai pengaruh pencatatan administrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran telah dilakukan sebelumnya, diantaranya Herriyanto (2012) yang menunjukkan pencatatan administrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan hasil penelitian Mutmainna (2017) yang menunjukkan bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Putri (2014) Setiap organisasi, *private* atau publik memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi. SDM yang memiliki kompetensi tinggi merupakan aset yang penting bagi suatu organisasi sekaligus sebagai tulang punggung untuk meningkatkan daya saing organisasi dalam era globalisasi. SDM yang berkualitas juga bisa diandalkan dalam menghadapi suasana kerja serta kondisi lingkungan social masyarakat yang selalu berubah secara dinamis. Hal

ini juga berlaku pada seluruh OPD dalam melaksanakan semua program kerja terutama dalam menyusun anggaran. Kompetensi pegawai juga sangat dibutuhkan untuk memahami dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan dalam melakukan pekerjaan.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Mutmainna (2017) dan Priatno (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Namun, berbeda dengan penelitian Rerung (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apakah perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran OPD Provinsi Riau? 2) Apakah pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran OPD Provinsi Riau? 3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran OPD Provinsi Riau.

TELAAH PUSTAKA

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran) (Halim, 2014).

Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan pengenaan sanksi dan pemberian penghargaan alias reward atas pelaksanaan belanja K/L, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2014 tentang cara

pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian Negara/lembaga. Bagi K/L yang mempunyai hasil optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja tahun sebelumnya telah mencapai target akan mendapat penghargaan, penyerapan anggaran pun minimal 95%.

Shenny (2012) menuturkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

Perencanaan Anggaran

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:127) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran (Arif & Halim, 2013).

Pencatatan Administrasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Menurut (Andriansyah, 2015) mengatakan "Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-

mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik- mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan" dan mengatakan "Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu". Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ruang lingkup administrasi menurut (Andriansyah, 2015) yaitu: Menghimpun, mencatat, mengelola dan mengirim.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, mengatakan bahwa yang namanya kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas jabatannya. daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu perlu rasanya untuk lebih menekan kompetensi apa yang harus dikuasai sumber daya manusia dalam organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang berdampak langsung terhadap pengalaman.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Definisi perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) adalah “perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Tahapan perencanaan merupakan kunci sukses dalam mengelola keuangan daerah. Tahapan perencanaan ini didalam siklus pengelolaan keuangan daerah akan bersinergi dengan penganggaran. Luaran dari tahapan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yang merupakan landasan realisasi seluruh kegiatan selama tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah:

Ha₁ : Perencanaan Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pencatatan Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa administrasi menjadi salah satu komponen dari proses pembangunan karena administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah yang tertuang dalam sistem pemerintahan. Tujuan dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian proses yang berlandaskan kepada dijalankannya administrasi secara baik dan benar. Selain itu, administrasi dapat juga dinyatakan sebagai pengelolaan terhadap data dan informasi dalam bentuk penyusunan dan pencatatan secara terurut dan terorganisir baik

untuk kepentingan pihak luar maupun untuk kepentingan pihak dalam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah:

Ha₂ : Pencatatan Administrasi Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 8 menyebutkan bahwa “desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, sertasumber daya manusia”. Pernyataan ini memiliki makna bahwa sumberdaya manusia merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan desentralisasi. Mengelola sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya penting dilakukan supaya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dapat ditingkatkan.

Staf yang berpengalaman dan memiliki motivasi yang tinggi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan anggaran. Pada setiap OPD sudah menjadi suatu keharusan untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki skill terlatih serta mampu untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan sesuai kompetensi yang dimiliki. Staf harus memiliki uraian tugas yang sesuai dengan kompetensi (Hovart, 2005). Apabila setiap OPD sudah mempunyai SDM yang kompeten sesuai dengan uraian tugas yang diberikan, maka ini menjadi salah satu indikator untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang baik..

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

Ha₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Yang menjadi objek penelitian ini adalah bank BUMN di kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Riau berjumlah 27 OPD.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling. Setiap dinas/badan/kantor dikirim 3 kuesioner yang diberikan (1) Kepala dinas OPD (2) Kepala Bidang (3) Bendahara Pengeluaran. Sehingga total kuesioner yang dikirim adalah 81

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tingkat Penyerapan Anggaran(Y)

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Variabel penyerapan anggaran diukur dengan menggunakan skala likert antara 1 sampai 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran dan skor tertinggi (5) menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi.

Perencanaan Anggaran (X1)

UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan berintegrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran, sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahapan perencanaan.

Variabel Perencanaan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 6 indikator yang telah digunakan oleh Syarah (2016), yaitu: 1) Komprehensif 2) Terperinci 3) Disiplin 4) Fleksibel 5) Prioritas 6) Keterbukaan

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak tujuh pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Syarah (2016).

Pencatatan Administrasi (X2)

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Pencatatan Administrasi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 indikator yang telah digunakan oleh Julian (2017) yaitu: 1) Dokumen Penyusun Anggaran, 2)

Proses Penyusunan Dokumen Anggaran
3) Pagu Anggaran, 4) Pemahaman Peraturan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak empat pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Julian (2017).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisisioner yang telah digunakan oleh Moehariono (2014), yaitu: 1) Pengetahuan 2) Skills, 3) Sikap

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan dalam sebuah kuisisioner. Kuisisioner ini telah dikembangkan dalam penelitian Moehariono (2014).

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam persamaan satu berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Anggaran

α = konstanta

β = koefisien regresi

X₁ = variabel perencanaan

X₂ = variabel pencatatan administrasi

X₃ = variabel kompetensi sumber daya manusia

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Riau berjumlah 27 OPD. Penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pekanbaru.

Kuisisioner yang disebar pada 27 OPD di Provinsi Riau secara langsung dengan total kuisisioner sebanyak 81 kuisisioner. Dari seluruh kuisisioner yang disebar oleh peneliti jumlah yang kembali berjumlah 67 kuisisioner (82,71%) dan jumlah kuisisioner yang tidak mendapat respon sebanyak 14 kuisisioner (17,29%). Kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 67 kuisisioner (100%).

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

Hasil analisis deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran (X1)	67	27	40	33,42	3,385
Pencatatan Administrasi (X2)	67	10	20	15,06	2,405
kompetensi sumber daya manusia (X3)	67	30	50	40,30	4,299
Penyerapan Anggaran (Y)	67	6	15	10,70	2,153
Valid N (Listwise)	67				

Sumber : Data Olahan 2020

Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Penyerapan anggaran yang diukur menggunakan 3 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Perencanaan Anggaran yang diukur menggunakan 8 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Pencatatan administrasi yang diukur menggunakan 4 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid. Kompetensi SDM yang diukur menggunakan 10 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Aturan umum yang dipakai *cronbach's alpha* $\geq 0,60$ sudah mencerminkan yang *reliable*. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Instrument Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
1	Perencanaan Anggaran (X1)	0,856	0,6	Reliabel
2	Pencatatan Administrasi (X2)	0,820	0,6	Reliabel
3	kompetensi sumber daya manusia (X3)	0,819	0,6	Reliabel
4	Penyerapan Anggaran (Y)	0,840	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan uji reliabilitas di atas di disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan *reliable*, hal ini terlihat dari nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0.60.

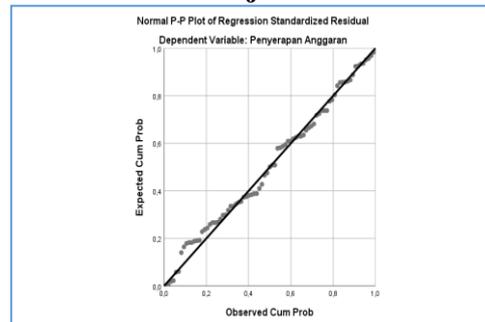
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel

terikat (*dependent*) dengan variabel bebas (*independent*) keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS yaitu gambar *Normal Probability Plot*.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan 2020

Pada gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indepenen. Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila *tolerance value* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 .

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,520	1,921	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pencatatan Administrasi	0,558	1,791	Tidak terdapat Multikolinieritas
kompetensi sumber daya manusia	0,455	2,197	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan 2020

Dari perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai *tolerance* untuk seluruh variabel independen $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Maka dapat disimpulkan

keseluruhan variabel independen tersebut bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin-Watson*. (Sekaran, 2006).

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson.</i>	N	Keterangan
1,118	67	Tidak terdapat autokorelasi

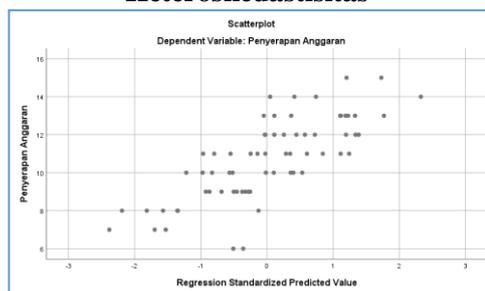
Sumber : Data Olahan 2019

Dari hasil perhitungan analisis data diatas, angka DW sebesar 1.993 dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi karena angka DW berada antara -2 sampai +2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya).

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan 2020

Dari grafik *scatterplot* pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5,380	1,859		-2,894	0,005
Perencanaan Anggaran	0,158	0,072	0,248	2,203	0,031
Pencatatan Administrasi	0,262	0,097	0,293	2,698	0,009
kompetensi sumber daya manusia	0,170	0,060	0,340	2,824	0,006

Sumber : Data Olahan 2020

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).

Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0.765	0.585	0.565	1.420

Sumber : Data Olahan 2020

Dari tabel diatas diperoleh nilai *R square* sebesar 0.585. artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

sebesar 58,5% sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel perencanaan anggaran (X_1) dengan nilai $t_{hitung} 2,203 > t_{tabel} 1,998$ atau sig sebesar $0,031 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel perencanaan anggaran (X_1) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Terlambatnya daya serap suatu anggaran, menurut Halim (2014:91) merupakan cerminan ketidaksiapan dan lemahnya perencanaan dari program pemerintah. Hal ini disebabkan karena perencanaan anggaran adalah faktor yang paling menentukan yang akan mengendalikan dan menentukan arah yang harus dijalani oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monik Zarinah (2016), Deiby (2016), Prasetyo Adi Priatno (2013), Mutmainna (2017), Halimah Lelinta Kaban (2016) Herriyanto (2012), dan Ledy S. Gagola (2017) mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh pada penyerapan anggaran.

Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa variabel pencatatan administrasi (X_2) dengan nilai $t_{hitung} 2,698 > t_{tabel} 1,998$ atau sig sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima, variabel pencatatan administrasi (X_2) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herriyanto

(2012) yang menemukan hasil penelitian pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran mengungkapkan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh pada penyerapan anggaran, semakin baiknya pencatatan administrasi dalam suatu organisasi akan meningkatkan penyerapan anggaran dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini pencatatan administrasi memiliki peranan penting terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi yang dilaksanakan secara baik, yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.

Beberapa masalah yang sering ditemui dalam kaitannya dengan administrasi diantaranya adalah kesalahan dalam penentuan akun. Dampak dari jenis kesalahan ini menyebabkan diperlukannya revisi dokumen anggaran dan terjadinya penolakan pembayaran oleh KPPN. Apabila kesalahan akun masih berada dalam wewenang pengguna anggaran cukup dilakukan dengan mengubah ADK dan POK. Namun apabila terjadi kesalahan akun yang mewajibkan dokumen anggaran harus direvisi maka sesuai ketentuan harus melalui Kementerian Keuangan dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi SDM (X_3) dengan nilai $t_{hitung} 2,824 > t_{tabel} 1,998$ atau sig sebesar $0,006 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima, variabel kompetensi SDM (X_3) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi SDM maka semakin tinggi penyerapan anggaran.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia telah baik, maka akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monik Zarinah (2016), Deiby (2016), Tisa Indriani (2016), Mutmainna (2017), dan Herriyanto (2012), yang menyatakan kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, kompetensi SDM membutuhkan kemampuan dan kewenangan pemimpin untuk menjelaskan peran masing-masing anggota dengan cara meninjau kembali tugas-tugas, pendelegasian wewenang hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam *job description*.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka akan mengakibatkan semakin baiknya penyerapan anggaran. Begitu pula sebaliknya, jika semakin buruk

perencanaan anggaran maka akan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak baik.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik pencatatan administrasi seorang dalam bekerja maka akan mengakibatkan tingkat penyerapan anggaran yang semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin buruk pencatatan administrasi maka akan mengakibatkan penyerapan anggaran yang semakin rendah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dengan nilai koefisien bertanda positif yang berarti, bahwa semakin baik kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan mengakibatkan kualitas penyerapan anggaran yang dibuat semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan mengakibatkan tingkat penyerapan anggaran yang semakin buruk.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pihak pimpinan OPD untuk memberikan pelatihan atau pendidikan terhadap para pegawai guna meningkatkan kompetensinya, agar minimalisasi permasalahan penyerapan anggaran APBD Provinsi Riau
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel atau dengan menambah ruang lingkup objek

penelitian, karena dalam penelitian hanya berjumlah 3 responden di setiap OPD sehingga belum dapat mewakili populasi lain yang ada.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Diharapkan bagi pihak pimpinan OPD untuk memberikan pelatihan atau pendidikan terhadap para pegawai guna meningkatkan kompetensinya, agar minimalisasi permasalahan penyerapan anggaran APBD Provinsi Riau.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel atau dengan menambah ruang lingkup objek penelitian, karena dalam penelitian hanya berjumlah 3 responden di setiap OPD sehingga belum dapat mewakili populasi lain yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Andriansyah.,M.Si. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama
- Arif, E.(2013). Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau Tahun 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado. 25-28 September 2013.

BPKP.(2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review.

Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat 2016. Pengaruh perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Manado: Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Vol.9*

Desika Widianingrum, Alwan Sri, Ika Barokah 2017. Faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran OPD Pemerintah Situbondo. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen VOL.11*.

Economic Development Policy and Research Department. 2011. *Absorptive Capacity Constraints. The Causes and Implications for Budget Execution*. Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda.

Firdos dan Rawuh. 2012. Mengurai sindrom akhir tahun anggaran, Magister ilmu administrasi, Universitas Jendral Sudirman, Telah dipresentasikan pada *symposium nasional ilmuwan administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) Ke-2*, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 10 Februari 2012

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*.

- Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muh.Syam. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrik Samosir 2017. Analisis pengaruh faktor perencanaan terhadap penyerapan anggaran pada dinas pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Utara. Universitas HKBP Numensen Fakultas ekonomi :*Jurnal Ilmiah maksitek vol.2 no.2 mei 2017*.
- Herriyanto, H. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Jakarta: FEUI.
- Hovart, A. (2005). *Why Does Nobody Care about The Absorption? WIFO Working Paper*. No. 258. Vienna.
- Indriani, Tisa. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja daerah. Universitas Pendidikan Indonesia: *Perpustakaan.upi.edu*
- Kuncoro, D. Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.I Dinas PU Prov. Kaltim. *Skripsi*. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mathis, L. Robert and J. H. Jackson. 2010. *Human Resorce Management*. Prentice Hall, New Jersey.
- Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementrian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Tesis*. Jakarta: UI.
- Muhrom Ali Rozai, Lilik Subagiyo. 2015. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol. 9 No. 1 Juni 2015: 72 – 89*
- Mutmainna, Iqbal 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Makasar: Universitas Fajar.
- Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting, Vol.2, No.3, Hlm1*.
- Nugroho, Budi. 2015. Mengenal Lebih Dekat Konsep Anggaran Daerah. <https://konsultankti.wordpress.com/2015>.

- Peraturan Presiden No. 23 tahun 2004
Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 249/PMK.02/2011 *Tentang Penyerapan Anggaran.*
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.02/2014 *Tentang aturan pengenaan sanksi dan reward atas pelaksanaan belanja K/L.*
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 *Tentang Perencanaan.*
- Priatno, P.A., dan Khusaini, M. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *e-Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Universitas Brawijaya (online) (<http://JIM.FEB.UB.ac.id>). Diakses 15 Mei 2015.*
- Putri, C.T. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu.*
- Rahadi Nugroho, Salaman Alfarisi, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi melonjaknya penyerapan anggaran quartal IV instansi pemerintah (studi pada badan pendidikan dan pelatihan keuangan). *Jurnal BPKP Volume 1 Jilid 1 Tahun 2017 halaman 22-37.*
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis 1.* (4th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, Rusda. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemda DKI Jakarta (Studi Kasus: Sekretariat DPRD DKI Jakarta Untuk T.A 2010 dan 2011). *Skripsi. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.*
- Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi)*
- Undang Undang nomor 17 tahun 2003 *Tentang peyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga.*
- Undang Undang nomor 30 tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*
- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 *Tentang Defenisi Perencanaan*
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia.
- www.riau.go.id
www.bertuahpos.com
www.medcom.id
- Zarinah, Monik. 2015. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Banda Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam. *Jurnal ekonomi dan bisnis vol 9-10.*